

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OBAT TRADISIONAL
TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3828/Pid.Sus/2019/PN Mdn)**

Oleh:
Muhamad Randi Hidayatuloh
E1A017095

ABSTRAK

Masalah izin edar khususnya mengenai izin edar pada produk obat tradisional sangat penting untuk mendapat perhatian dari konsumen maupun pelaku usaha. Ketiadaan izin edar pada produk obat tradisional mengindikasikan bahwa produk obat tradisional tersebut tidak aman untuk dikonsumsi. Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal ini berakibat hukum pada pelaku usaha untuk selalu beritikad baik agar hak konsumen tersebut dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen obat tradisional tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 3828/Pid.Sus/2019/PN. Mdn).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Putusan Nomor 3828/Pid.Sus/2019/PN. Mdn, hakim dalam putusannya telah menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat FITRIZAL, tetapi hakim dalam menerapkan hukumnya kurang lengkap karena hanya menerapkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk menjerat Fitrizal.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Izin Edar.**

**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF TRADITIONAL MEDICINES WITHOUT MARKETING AUTHORIZATION BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION
(STUDY DECISION NUMBER 3828 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mdn)**

by:
Muhamad Randi Hidayatuloh
E1A017095

ABSTRACT

Marketing authorization, especially regarding distribution permits for traditional medicinal products, are very important to get the attention of consumers and business actors. The absence of a distribution permit for traditional medicinal products indicates that these traditional medicinal products are not safe for consumption. Consumers have the right to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, this has a legal effect on business actors to always have good intentions so that the consumer's rights can be fulfilled. This study aims to determine the legal protection for consumers of traditional medicines without marketing authorization based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (Study Decision Number 3828 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mdn).

The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Sources of data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, the data obtained were presented with systematic descriptive text, and the data analysis method used was the qualitative normative method.

Based on the research results, it is concluded that consumers have received legal protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In Decision Number 3828 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mdn, the judge in his decision has applied Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to ensnare FITRIZAL, but the judge in applying the law is incomplete because it only applies Article 8 paragraph (1) letter an of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the judge did not apply the provisions of Article 8 paragraph (1) letter d concerning actions that are prohibited for business actors to ensnare Fitrizal.

keywords: *Legal Protection, Consumers, Businessmen, Marketing Authorization.*